

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Surat al baqarah 168

Surat AL-Baqarah Ayat 188

Buku buku

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* Jakarta : kencana

Adiwarman,Arman Nefi,Ivan Yustiavandana. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana .

J. Soedrajat Djiwandono, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. 34

Jeremy Bentham. 2013. *Teori Perundang-Undangan*. Bandung : Nuansa Cendekia dan Nusamedia. Hlm. 106

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung.

Jurnal

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003),
- Carl Edward Ty Williams. 1998. *The Effects of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty of Confidentiality*. Canada : CARSWELL, a division of Thomson Canada. Hlm. 9
- Hendra Kusuma dalam *Varia Pengadilan Majalah Hukum* Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal49
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn : West Publishing Co. Hlm 884. Diterjemahkan oleh Adiwarmarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Hlm. 10
- Michael Levi and Peter Reuter. 2006. *Money Laundering*. Chicago : The University of Chicago Press. Hlm. 25. Diterjemahkan secara bebas oleh Adiwarmarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Hlm.55.
- P.de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel 1, Kluwer, Deventer*, Tahun 1986 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam *Varia Pengadilan Majalah Hukum* Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.
- Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota : West Publishing Co. Hlm. 228 Diterjemahkan oleh Adiwarmarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998. ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam *Varia Pengadilan Majalah Hukum* Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.
- Sarah N. Welling. *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam : Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. 1992. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney : The Law Book Company

Limited. Hlm. 201. Diterjemahkan oleh Adiwarmarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal.

Undang undang

Kitab undang undang hukum pidana

Kitab undang-undang hukum acara pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undanng-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Internet

<http://hukummulia.blogspot.com/2009/04/hukum-per-undang-undangan.html> diakses pada tanggal 17 oktober 2019

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hocpersoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu> diakses pada tanggal 11 februari 2020

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hocpersoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu> diakses pada tanggal 11 februari 2020

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 11 februari 2020

<https://idtesis.com/penelitian-hukum-normatif-2/> diakses pada tanggal 5 november 2019 jam 21:00

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5218e5d1539e8/kewenangan-kpk-dalam-melakukan-penuntutan-kasus-pencucian-uang/>

<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>

lain lain

Sambutan Pemerintah atas *Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 september 2003 dicetak oleh Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 11-12

Yenti Ginarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013, hal. 6